

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Berikut dapat disampaikan penjelasan mengenai pengertian koperasi, tujuan koperasi, fungsi dan peran koperasi, prinsip koperasi, bentuk dan jenis koperasi, jenis transaksi pada koperasi, serta pencatatan akuntansi koperasi.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi dibentuk oleh perkumpulan orang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembentukan badan usaha yang dikelola berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong-royong (Permekop-KUKM, 2023).

2.1.2 Tujuan Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Perkoperasian (Pemerintah Indonesia, 2012), bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan

berkeadilan. Berdasarkan UU No.17 Tahun 2012 pasal 4, dapat diuraikan tujuan Koperasi Indonesia meliputi tiga hal sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan Peran Koperasi Fungsi dan peran Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Harahap *et al.*, 2023):

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.4 Prinsip Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 6 tentang Perkoperasian, disebutkan bahwa prinsip koperasi (Pemerintah

Indonesia, 2012) meliputi Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka; Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen; Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi; Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.5 Bentuk dan Jenis Koperasi

Bentuk koperasi di Indonesia ada dua yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekuder. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Tentang Perkoperasian, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Anggota koperasi primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer. Anggota koperasi sekunder merupakan koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar (Pemerintah Indonesia, 2012).

Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mina Kota Tegal termasuk dalam bentuk koperasi primer. Hal ini dikarena KUD Karya Mina Kota Tegal beranggotakan masyarakat yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dalam bidang perikanan. Dalam kegiatan usahanya KUD Karya Mina Kota Tegal menyediakan pelayanan jasa koperasi yang dapat membantu anggotanya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Jenis koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 83 Tentang Perkoperasian, yaitu Koperasi Konsumen yang melakukan pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota; Koperasi Produsen yang melakukan pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota; Koperasi Jasa yang melakukan pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota; dan Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota (Pemerintah Indonesia, 2012).

2.1.6 Jenis Transaksi Pada Koperasi

Menurut Purwantini (2021), dalam menjalankan usahanya koperasi memiliki beberapa jenis transaksi yaitu:

- a. Transaksi Antara Koperasi dan Anggota:
 - 1) Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok dan simpanan wajib)
 - 2) Setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka, dan simpanan lainnya)
 - 3) Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota
 - 4) Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi:
 - a) Kegiatan proses produksi usaha anggota;
 - b) Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan;
 - c) Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota.
- b. Transaksi Antara Koperasi dengan Non-Anggota:
 - 1) Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan;
 - 2) Pembelian barang/jasa dari non anggota.
- c. Transaksi Khusus Pada Koperasi:
 - 1) Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain;

- 2) Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain;
- 3) Pembentukan cadangan;
- 4) Pembeban biaya koperasi;
- 5) Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan.

2.1.7 Pencatatan Akuntansi Koperasi

Koperasi membutuhkan catatan akuntansi untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut nantinya digunakan oleh pengurus dalam penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sekurang-kurangnya diterbitkan 1 (satu) bulan sebelum kegiatan tersebut diselenggarakan (Kementerian Koperasi-UKM, 2015)

2.2 Laporan Keuangan

Berikut dapat disampaikan penjelasan mengenai pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan serta karakteristik laporan keuangan.

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang menyampaikan kegiatan transaksi keuangan suatu organisasi dalam kaitannya memberikan tanggung jawab atas aktivitas yang dilaksanakan.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas / laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari laporan keuangan (IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), 2009).

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2009), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja keuangan, serta laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah (Mursidah & Nasution, 2022).

2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2009), dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), terdapat karakteristik kualitatif dalam laporan keuangan yaitu:

1) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2) Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3) Materialistis

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) mempengaruhi keputusan yang diambil.

4) Keandalan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5) Subtansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6) Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

7) Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8) Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja

keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

9) Tepat Waktu

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal.

10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Koperasi

Dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan standar akuntansi keuangan yang berguna untuk menyusun laporan keuangan. Dibawah ini merupakan standar akuntansi yang digunakan oleh koperasi.

2.3.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP)

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang baru Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi

Koperasi Sektor Rill, agar seluruh koperasi menggunakan dan mematuhi aturan yang baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (Permekop-KUKM, 2023).

2.3.2 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria, seperti ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas koperasi. Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau catatan atau materi penjelasan. Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria pengakuan mengacu kepada pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari dalam entitas (IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), 2009)

Menurut SAK ETAP IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2009), kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria

pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan jika pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas oleh pengguna laporan keuangan .

Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) (2009) dalam menyusun laporan keuangan, entitas harus menggunakan dasar akrual kecuali laporan arus kas. Pos-pos yang diakui dalam dasar akrual adalah sebagai berikut:

a) Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

b) Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

c) Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d) Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

e) Laba Rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2.3.3 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Menurut SAK ETAP

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan koperasi untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu (Permekop-KUKM, 2023).

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar (IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), 2009) yaitu:

- a) Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.3.4 Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Dalam SAK ETAP (IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), 2009) laporan keuangan entitas yang lengkap meliputi:

1) Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu sampai akhir periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam neraca mencakup pos-pos seperti kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Klasifikasi aset

dan kewajiban menurut SAK ETAP entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Apabila pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi mencakup pos-pos seperti pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

- a) Laba atau rugi untuk periode
- b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
- d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
 - 1) Laba atau rugi untuk periode
 - 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
 - 3) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian

4) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

a) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- 1) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
- 2) Penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain
- 3) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- 4) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan
- 5) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi
- 6) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang

sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

b) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- 1) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya
- 2) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya
- 3) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture* (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan)
- 4) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari *joint venture* (selain penerimaan dari

efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan)

- 5) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
- 6) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain

c) Aktivitas Pendanaan

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- 1) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain
- 2) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas
- 3) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya
- 4) Pelunasan pinjaman
- 5) Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan

Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran

kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Menurut SAK ETAP CaLK yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Catatan atas laporan keuangan berisi pula informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan serta memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Menurut SAK ETAP Catatan atas Laporan Keuangan harus:

- a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu
- b) Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
- c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP
- b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan
- c) informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut
- d) Pengungkapan lain

Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya.

2.3.5 Manfaat Penerapan SAK ETAP

SAK ETAP memiliki beberapa manfaat untuk diterapkan, diantaranya adalah dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil,

menengah, diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, agar dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Laporan keuangan yang telah diaudit dapat digunakan salah satunya untuk mendapatkan dana (misalnya dari *Bank*) untuk pengembangan usaha (Mursidah & Nasution, 2022).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	(Septiawati & Arliena Hafni, 2023)	Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Cu Satu Hati	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan KSP CU SATU HATI tahun 2022 sudah sangat baik dan lengkap, serta sesuai dengan SAK ETAP. Laporan keuangan KSP CU SATU HATI terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK.
2.	(Shafira <i>et al.</i> , 2022)	Analisis Implementasi SAK ETAP Pada Koperasi Di Kota Mataram	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Sepakat Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam Dharma Sari Bumi Pagutan masih dalam tahap pengembangan dalam melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam SAK ETAP
3.	(Hafidzah <i>et al.</i> , 2022)	Analisis Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Koperasi Karyawan PTPN IV Kebun Bah Jambi belum menerapkan SAK ETAP dengan benar. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal Koperasi Karyawan PTPN IV

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
				Kebun Bah Jambi hanya menyajikan neraca, laporan perhitungan hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan tetapi belum menyusun laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan SAK ETAP
4.	(Harahap <i>et al.</i> , 2023)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kota Padangsidimpuan	Metode Analisis Deskriptif Komparatif	Ditemukan bahwa laporan keuangan koperasi pada tahun 2021 belum memenuhi prinsip SAK ETAP dan beberapa laporan belum disajikan seperti laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan akuntansi yang diperoleh oleh sumber daya manusianya.
5.	(Pratama <i>et al.</i> , 2022)	Analisis Penerapan SAK-ETAP Terhadap Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Notowono, Yogyakarta)	Metode Analisis Deskriptif Komparatif	Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan yang berada di Koperasi Notowono tidak sesuai dengan SAK ETAP, laporan keuangan sesuai SAK ETAP yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, tetapi koperasi Notowono hanya menggunakan laporan laba rugi dan neraca.

No	Nama & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
6.	(Azizah, 2022)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Unit Desa Ujung Raja Tahun 2018-2020	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Koperasi Unit Desa Ujung Raja tahun 2018 dalam menyajikan dan mengungkapkan informasi akuntansi berdasarkan SAK ETAP menunjukkan bahwa, penyajian informasi neraca Koperasi Unit Desa Ujung Raja sudah sesuai dengan SAK ETAP, namun pada KUD ini masih ditemukan pos-pos yang belum tersaji.
7.	(Mursidah & Nasution, 2022)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Tunas Wira Mandiri	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Koperasi Tunas Wira Mandiri mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

